

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seringkali terjadi permasalahan dalam proyek sehingga mengakibatkan kegagalan pelaksanaan suatu proyek. Umumnya permasalahan yang terjadi pada proyek seperti permasalahan dalam perencanaan pengadaan dan persiapan pengadaan. Permasalahan dalam perencanaan pengadaan berupa perencanaan pengadaan yang tidak tersusun atau penyusunan tanpa justifikasi kebutuhan dan tidak didukung dalam proses perencanaan yang sistematis, pemaketan yang tidak tepat dan pemecahan paket menghindari tender, pelaku pengadaan tidak memenuhi persyaratan dan perhitungan waktu yang tidak cermat (bikon pupr, 2016).

Namun, permasalahan dalam persiapan pengadaan yang biasa terjadi dalam proyek terdiri dari permasalahan spesifikasi (terlihat dalam penetapan spesifikasi tanpa justifikasi teknis, spesifikasi diskriminatif dalam pengadaan yang dilakukan dengan tender/seleksi, spesifikasi mengarah ke produk tertentu), HPS (harga perkiraan sendiri) terlihat dalam penetapan HPS tanpa justifikasi teknis, menambah kalkulasi harga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sumber informasi HPS tidak dapat dipertanggung jawabkan, penyusunan HPS tidak didokumentasikan) dan draft (tidak ada pembuatan rancangan kontrak atau rancangan kontrak tidak kredibel). Permasalahan tersebut terjadi dikarenakan tugas PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang tidak terlaksana dengan baik sehingga

dapat mengakibatkan penghentian kontrak, pemutusan kontrak atau berakhirnya kontrak dalam suatu proyek (Patria, 2016 dan A.zik2019).

PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksana pengadaan barang jasa pada instansi pemerintah yang memegang peranan penting dalam terselenggaranya proyek pengadaan barang dan jasa. Dalam bahasa sederhana tugas PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah menjaga dan mengawal seluruh proses pengeluaran negara dari awal perencanaan hingga akhir penyelesaian serta memastikan seluruh aspek dari pengadaan tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku baik sisi teknis maupun administrasi. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) merupakan salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar terhadap kelangsungan proyek pada instansi pemerintah, khususnya dalam penerapan sistem manajemen yang dilakukan, sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan dapat menghasilkan pekerjaan konstruksi dengan tepat waktu, mutu dan biaya lingkup pekerjaan sesuai dengan yang telah direncanakan dan tetap menjaga kualitas pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup, rencana mutu kontrak, spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen kontrak, dan semua ini tidak terlepas dari kinerja sumber daya manusianya, termasuk sumber daya manusia dalam posisi sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).(pengadaan web.id /2016)

Untuk menghindari kegagalan proyek dan demi mencapai keberhasilan pelaksanaan proyek diperlukan PPK (Pejabat Pembuat

Komitmen) yang berkompetensi dalam mengelola proyek pemerintah, karena peran Sesuai peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 pasal 88. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada K/L/Pemda wajib memiliki Sertifikat Kompetensi dibidang PBJ paling lambat 31 Desember 2023. Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri/Personel Lain yang bertugas sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) /Pokja Pemilihan/PP wajib memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang PBJ paling lambat 31 Desember 2023. Sementara diperaturan presiden no 16 tahun 2018 pasal 10 point 5 dijelaskan Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai. Pejabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat merangkap sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Maka dari pada itu seharusnya KPA harus mempunyai kompetensi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) (Irawan, 2020).

Saat ini dalam penyelenggaraan proyek konstruksi penunjukkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) selaku pimpinan (manajer) proyek konstruksi menjadi pemasalahan dikarenakan keterbatasan jumlah SDM (sumber daya manusia) dalam mengelola proyek konstruksi yang dilaksanakan. Kadang kala PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang ditunjuk oleh PA bukanlah orang yang berkompeten atau berpengalaman dalam dunia proyek konstruksi ataupun berlatar belakang ilmu konstruksi sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian waktu yang telah disyaratkan, penurunan mutu pekerjaan dan pemanfaatan dari hasil proyek tersebut yang tertunda atau tidak dapat difungsikan sesuai target yang

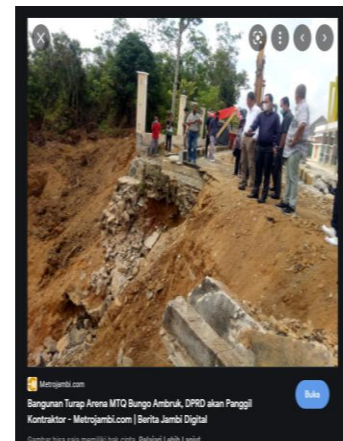
diharapkan (Irawan, 2020). Pada tahun 2019, Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Bungo melaksanakan Peningkatan Jalan Paket II dengan Pagu Anggaran 10 Milyar yang masa pelaksanaannya melewati tahun anggaran dan akhirnya memakai klausula penambahan waktu 50 (lima Puluh) hari kalender.(lap. Tahunan 2019)



SUARA BUNGO – Tahun 2019 hanya tersisa satu hari lagi, namun, pengerjaan proyek di Kabupaten Bungo masih banyak yang belum selesai dikerjakan oleh rekanan kontraktor. Diprediksi, dalam waktu tersebut tidak akan selesai tepat waktu terhadap proyek-proyek tersebut.

Pengerjaan proyek yang diprediksi tidak akan selesai menjelang akhir tahun salah satunya adalah Jalan Imam Bonjol (depan telkom) sama Pedestrian jalan Sri Sudewi.

Diketahui, Proyek tersebut dikerjakan oleh rekanan PT. Rama Utama Mandiri, masa pengerjaannya 140 hari kalender. Dananya sebesar Rp10.655.640.000,- Bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).



Bangunan Turap Arena MTQ Bungo Ambruk, DPRD akan Panggil Kontraktor - Metrojambi.com | Berita Jambi Digital

gambar proyek yang terlambat

gambar proyek yang gagal

Permasalahan lain yang sering terjadi di Kabupaten Bungo adalah kinerja Pejabat Pembuat Komitmen masih dinilai belum sempurna dilihat dari terdapatnya keterlambatan dalam perihal penerapan aktivitas– aktivitas pengadaan barang jasa pada tahun 2018, 2019, dan, tahun 2020. Dari informasi yang didapat dari Ipse Kabupaten Bungo rata- rata pengadaan barang jasa terjadi keterlambatan pada awal- awal tahun tiap tahunnya yaitu pada 3 tahun terakhir ini. Dimana proyek rata- rata mulai terlambat, pada tahun 2018, 2019 dan, tahun 2020 pada pertengahan bulan Oktober. PA atau KPA rata- rata tidak punya sertifikat dasar pengadaan

barang dan jasa ini bisa dilihat dari situs LKPP kepemilikan sertifikat dasar.

Dengan beberapa fakta tersebut melalui penelitian ini peneliti ingin mengetahui sejauh mana seorang PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) telah memenuhi kompetensi yang ada selaku pimpinan (manajer) proyek konstruksi mempengaruhi keberhasilan proyek di Kabupaten Bungo. Karena itu penulis tertarik mengangkat permasalahan diatas dalam bentuk karya ilmiah dengan judul tesis “Hubungan Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terhadap Keberhasilan Proyek Kontruksi di Kabupaten Bungo”.

1.2 Pertanyaan Penelitian

1. Apa saja faktor Kompetensi PPK proyek konstruksi di Kabupaten Bungo?
2. Apa faktor kompetensi PPK yang paling dominan mempengaruhi Keberhasilan proyek konstruksi di Kabupaten Bungo?
3. Apa solusi yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi PPK di Kabupaten Bungo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa faktor Kompetensi PPK proyek konstruksi di Kabupaten Bungo.
2. Untuk menentukan faktor kompetensi PPK yang dominan yang mempengaruhi keberhasilan proyek konstruksi di Kabupaten Bungo.

- Untuk menemukan solusi dalam meningkatkan kompetensi PPK guna untuk meningkatkan keberhasilan proyek konstruksi di kabupaten bungo.

1.4 Batas Masalah Penelitian

Agar dapat memberikan arah yang jelas dalam upaya mencapai tujuan dan dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya, maka penelitian ini dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut:

- Penelitian ini difokuskan pada kompetensi PPK ((Pejabat Pembuat Komitmen) terhadap keberhasilan penyelesaian proyek konstruksi.
- Proyek yang diteliti adalah proyek konstruksi yang dilaksanakan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 1.4 Daftar pekerjaan 2016 -2019

No	Nama Kegiatan	Nilai	Tahun Anggaran
1	Pembangunan Pasar Ds. Gapura Suci Kecamatan Pelepat	Rp1.104.480.000,00	2016
2	Pembangunan Gedung UPT dan Sentra Promosi Industri Kecil Menengah (IKM)	Rp595.890.000,00	2016
3	Pembangunan Gedung Diagnostik Terpadu 4 Lantai (DAK)	Rp43.103.000.000,00	2017
4	Pengawasan Gedung Diagnostik Terpadu (4 Lantai) RSUD H. Hanafie Muara Bungo	Rp652.700.000,00	2017
5	Pengadaan Bangunan Kesehatan (Puskesmas Rantau Iki)	Rp2.200.000.000,00	2017
6	Pembangunan jembatan beton Sei.Batang Leban Ds. Trans Leban (DAK Transdes)	Rp1.250.000.000,00	2018
7	Pembangunan Bangunan Bawah Jembatan (DAU)	Rp3.200.000.000,00	2018
8	Pembangunan Gedung farmasi	Rp7.100.000.000,00	2018
9	Rehabilitasi pasar tradisional modern	Rp2.600.000.000,00	2018

10	Pembangunan Jalan Masuk Lokasi MTQ 2019	Rp1.800.000.000,00	2018
11	Pembangunan Bangunan MTQ	Rp16.542.747.460,45	2019
12	Pembangunan jalan untuk Lokasi MTQ	Rp22.999.999.612,35	2019
13	Pembangunan Rangka Baja Jembatan Ds. Tanjung Belit	Rp6,379,999,291.65	2019
14	Pembangunan Rangka Baja Jembatan Ds. Rantau Kelayang	Rp6.199.999.380,78	2019
14	Peningkatan Jalan Kabupaten Paket II	10.800.000.000,00	2019
15	Pembangunan Gedung Rawat Inap	Rp25.960.175.021,12	2019
16	Pembangunan Rumah Sakit Pratama tipe D Rantau Ikil	Rp2.355.149.698,05	2019
17	Pembangunan Abutmen Jembatan Sei.Batang Jujuhan - Ds.Rantau Panjang	Rp2.983.918.379,20	2020

3. Data penelitian diambil menggunakan kuesioner yang disebar ke responden, sehingga data yang diperoleh merupakan hasil persepsi dari responden yang merupakan bagian dari pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi di Kabupaten Bungo.
4. Responden terdiri dari Owner, Pelaksana Proyek, Konsultan, dan Tenaga Ahli yang terlibat dalam proyek konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian diharapkan dapat memberi beberapa manfaat antara lain:

1. Sebagai informasi atau pengetahuan baru tentang hubungan kompetensi pada project manager umumnya dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

khususnya yang berhubungan dengan keberhasilan penyelesaian proyek konstruksi.

2. Dapat dijadikan bahan informasi bagi stakeholder proyek atau pihak – pihak yang berkepentingan (Owner, Pelaksana Proyek, Konsultan dan Tenaga Ahli) didalam penyelesaian proyek tentang pengaruh kompetensi terhadap keberhasilan penyelesaian proyek secara keseluruhan.
3. Dapat dijadikan referensi khususnya bagi owner dalam menyusun job dekripsi dari pada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan permasalahan, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan Teori-Teori yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah, juga dijabarkan tentang teori yang mendukung penelitian jadi dari teori yang dijabarkan tadi, pertanyaan penelitian yang diangkat sehingga dapat terjawab.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Meliputi metode dan jenis penelitian, sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, langkah-langkah menjalankan penelitian dan pengujian keabsahan data.

BAB IV PEMBAHASAN

Berisi tentang Hubungan Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terhadap Keberhasilan Proyek Kontruksi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan pada analisis hasil penelitian serta pembahasan.